

**KEPENTINGAN INDONESIA DALAM KERJASAMA ACFTA-ASEAN
TAHUN 2010**

Nastainu Nurhidayah, Sugiarto Pramono*

Department of International Relations – Universitas Wahid Hasyim

nastainunurhidayah@gmail.com

ABSTRAK

ACFTA ASEAN merupakan kerja sama negara Tiongkok atau China dengan negara – negara yang ada dalam suatu region ASEAN atau negara yang berada dibawah Regional Asia Tenggara. Dengan dibentuknya ACFTA negara anggota ASEAN dan Tiongkok dapat menyederhanakan aktivitas perdagangan diantara keduanya. Dalam penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui alasan Indonesia mendukung kerjasama ACFTA ASEAN dalam kepentingan Nasional di bidang Politik, Ekonomi, Ideologi hingga Citra didalam Pergaulan Internasional. Teori yang digunakan Penulis adalah Teori Kepentingan Nasional. Metode penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif dengan menggunakan pendekatan Kepustakaan yang menghasilkan data sekunder dari berbagai sumber serta melalui adanya Studi Kasus yang dihasilkan dari Implementasi Program ACFTA. Hasil dalam penelitian menjelaskan bahwa Kerjasama ACFTA adalah adanya suatu Kepentingan Politik, Kepentingan Ekonomi, Kepentingan Ideologi dan Kepentingan Citra terhadap Pembangunan Nasional.

Kata Kunci : *ACFTA, Ekonomi, Pembangunan Nasional, Tiongkok.*

ABSTRACT

ACFTA ASEAN is the cooperation of China or China with countries in an ASEAN region or countries under the Southeast Asian Region. With the establishment of ACFTA ASEAN member countries and China can simplify trade activities between the two. In this research, it aims to find out why Indonesia supports ACFTA ASEAN cooperation in the national interest in the field of Politik, Economy, Ideology to Citra in International Association. The theory used by the author is the Theory of the National Interest. This research method uses qualitative methods using a literature approach that generates secondary data from various sources as well as through case studies resulting from the implementation of the ACFTA program. The results in the study explained that ACFTA Cooperation is the existence of a political interest, economic interest, ideological interest and image interest in National Development.

Keywords: ACFTA, China, Economic, National Development.

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

ACFTA atau (*ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA*) merupakan suatu bentuk kerja sama dalam aspek ekonomi, sesuai dengan namanya ACFTA merupakan kerja sama negara Tiongkok atau China dengan negara – negara yang ada dalam suatu region ASEAN atau negara yang berada dibawah Regional Asia Tenggara.¹ Dalam sejarahnya ACFTA mulai berdiri pada tahun 2001 yang bertepatan dengan suatu kongres di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam dengan nama *ASEAN-CHINA Summit*. Pertemuan ini menyepakati setelah ASEAN dengan Tiongkok menyetujui usulan dari pemerintah China untuk membentuk suatu organisasi dalam ekonomi yang bernama ACFTA. Pada dasarnya konsentrasi pada bidang ini awalnya adalah; (1) Pertanian, (2) Telekomunikasi, (3) Pengembangan SDM, (4) Investasi serta (5) pembangunan ekonomi di sekitar area sungai Mekong di daratan indo-china yang meliputi Thailand, Vietnam, Laos hingga Kamboja.

Jauh sebelum terbentuk adanya ACFTA, berangkat dari keberadaan negara – negara ASEAN atau *Association of South East Asian Nations* yang merupakan kekuatan politik dan ekonomi karena populasi yang banyak serta banyaknya negara yang berkembang. Negara didalam kawasan ASEAN mempunyai posisi penting dalam ekonomi serta politik di kancah Internasional.

Setelah berkembangnya kawasan ASEAN yang telah diperhitungkan oleh pergaulan Internasional. Blok regional kawasan Asia Tenggara dalam Ekonomi pun otomatis ikut berkembang. ASEAN yang mempunyai suatu visi untuk mewujudkan dari KEA atau Komunitas Ekonomi ASEAN yang akan

¹ Anele, K. K. (2021). The Potential Impact of Piracy on the ACFTA: A Nigerian Perspective. *J. Territorial & Mar. Stud.*, 8, 5

menghadapi tantangan 2020 dengan suatu tujuan bersama – sama menjadi kawasan yang stabil, makmur dengan daya saing yang tinggi. Seiring berjalannya waktu untuk menghadapi Globalisasi yang kian dirupsi.² Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN atau *ASEAN Free Trade Area* yang disingkat menjadi AFTA merupakan persetujuan dari organisasi regional ASEAN yang mengurus tentang sektor produksi di seluruh negara ASEAN namun digarisbawahi dalam hal ini adalah produk lokal saja. Perjanjian ini akan berdampak pada aspek negatif maupun positif terhadap bangsa di seluruh negara ASEAN yang pada saat itu ketika tahun 1990an masih terus bergejolak tak menentu seperti Perang saudara di Kamboja maupun Krisis Moneter yang menghancurkan negara – negara berkembang di Asia Tenggara seperti Indonesia dan Thailand, namun Perjanjian ini akhirnya ditandatangani pada tanggal 28



Januari 1992 di Singapura.

Gambar 1.1 Logo Asean dan Negara – negara anggotanya.

AFTA pada tahun 1992 ketika dibentuk ASEAN hanya masih memiliki enam anggota resmi yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Malaysia dan Negara Indonesia. Lalu disusul oleh Vietnam yang bergabung tiga tahun

² Sheng, Y., Tang, H. C., & Xu, X. (2014). The impact of the ACFTA on ASEAN–PRC trade: estimates based on an extended gravity model for component trade. *Applied Economics*, 46(19), 2251-2263.
609
Nastainu Nurhidayah

setelahnya, Myanmar serta Kamboja yang sama – sama bergabung pada rentan 1997 dan 1999. Pada hari ini AFTA telah mempunyai anggota tetap diseluruh negara ASEAN yang berjumlah sepuluh negara. AFTA baru ditandatangani secaramutlak setelah pada akhir tahun 2015 yang memiliki berbagai tujuan untuk penyelenggaraan bersama yang notabenenya adalah dari dua tujuan ini mengarah dan bermuara kepada tujuan ASEAN yaitu mensejahterakan negara yang berada dalam kawasan regional ASEAN dalam berbagai bidang disegala kehidupan. Tujuan ini tertuang dalam AFTA, yaitu sebagai berikut:

- a. Peningkatan Daya saing organisasi ASEAN sebagai suatu basis dari Produksi didalam pasar dunia yang menghapuskan Bea dan halangan Non-Bea didalam Kawasan Asia Tenggara.
- b. Menarik investasi asing yang berpotensi memajukan bidang ekonomi di kawasan Asia Tenggara.



Gambar 1.2 Pembentukan AFTA di Singapura, 1992

Pada perkembangannya setelah terbentuknya kawasan bebas yang menarik beberapa mitra ASEAN, Negara Tiongkok adalah negara yang paling masif dalam perkembangan ekonominya. Setelah adanya Reformasi Deng Xio

Pada tahun 1978 hingga 1989, Tiongkok menjelma menjadi negara yang sangat maju dalam aspek ekonomi perubahan signifikan ini terlihat dari pengembangan strategi – strategi kontemporer serta program dari restrukturisasi ekonomi. Sebelumnya negara Tiongkok memiliki sistem finansial serta berbagai aktivitas ekonomi yang terpusat atau sentralisasi ke pemerintahnya saja hal ini dianggap tidak dapat memadai untuk menghadapi tantangan global. Setelah reformasi sistem keuangan dibenahi sehingga menempatkan sumber keuangan yang lebih besar kepada tangan – tangan individu maupun perusahaan dan membuka seluas – luasnya pasar Tiongkok kedalam ranah global.

Upaya Tiongkok untuk mengimplementasikan rencananya makin terbuka lebar dengan negara – negara tetangganya, namun tidak dapat dipungkiri selain melakukan hubungan bilateral, Tiongkok pun menaiki *step by step* yang meraba organisasi regional seperti ASEAN. Hubungan ini akhirnya dimulai pada awal dekade 90an yang dimana Tiongkok dinobatkan sebagai mitra wicara ASEAN pada *Ministerial Meeting* ke – 29 di Jakarta. Hubungan ini semakin meluas hingga melakukan perjanjian *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation* untuk akhirnya menandatangani suatu kebijakan penting dan krusial yang bernama ACFTA. Bukan tanpa sebab melihat negara Tiongkok sebagai negara yang menguasai peranan penting dalam aspek internasional lebih spesifiknya adalah perdagangan. Akhirnya ASEAN tertarik untuk melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi. Dengan berbagai pertimbangan ini Tiongkok-ASEAN akhirnya menyepakati berbagai perjanjian yang disebutkan diatas karena Tiongkok merupakan negara dengan kekuatan ekonomi terbesar didunia yaitu yang dimana total ekspor Tiongkok mengungguli negara *superpower* Amerika Serikat dengan Tiongkok sebesar 1.218 Miliar US\$ dan Amerika Serikat sendiri

diangka 1.161\$. Dengan dari melihat hal tersebut ASEAN memiliki harapan untuk Tiongkok dapat memberikan berbagai manfaat yang berimplikasi terhadap perkembangan ekonomi di ASEAN ikut maju maupun terdampak yang signifikan ke arah berkemajuan.

Kerjasama ACFTA ini merupakan aspek yang krusial, mengingat tujuan dari negara di ASEAN dapat dicapai apabila memberikan keuntungan yang begitu besar bagi negara – negara lainnya jika dimanfaatkan dengan baik. Perjanjian ACFTA berlaku pada 1 Juli 2004. Naskah dari perjanjian ini ditandatangani oleh seluruh ASEAN dan Tiongkok di Phnom Penh, Kamboja yang setelahnya ACFTA akan menciptakan kawasan ekonomi besar dengan total populasi hingga 1,7 miliar produk dan melakukan fleksibilitas bagi negara yang dianggap kurang berkembang seperti Vietnam, Myanmar, Laos serta Kamboja. Perjanjian yang komprehensif dengan tema membahas ACFTA ini dilakukan di Bali serta menghasilkan perjanjian – perjanjian didalam aspek ekonomi dalam bidang Perdagangan, Barang, Jasa serta Investasi yang merupakan pernyataan bersama untuk menegaskan kembali komitmen yang telah disepakati.

Untuk lebih memperdalam perjanjian ini dan melakukan liberalisasi perdagangan dikawasan Tiongkok-ASEAN, kemudian disepakati pula aturan prosedur bea dan cukai yang lebih masif, peningkatan investasi serta peningkatan kerjasama ekonomi melalui aspek teknis. ACFTA nantinya akan berkontribusi pada peningkatan ruang lingkup dari kerjasama serta mempromosikan perdagangan dan layanan investasi yang terdiri dari 15 pasal dan 26 aturan yang ditulis dalam naskah.

II. Rumusan Masalah

Setelah dijelaskan pada Latar Belakang Penelitian, kepenulisan ini akan

menjelaskan suatu rumusan masalah yaitu “*Mengapa Indonesia mendukung Kersama ACFTA – ASEAN pada Tahun 2010?*”

III. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah diuraikan penelitian ini untuk mengetahui alasan Indonesia mendukung Kerjasama ACFTA ASEAN Tahun 2010.

IV. Kerangka Dasar Teori

Pada bagian ini penulis akan menjabarkan tentang teori yang digunakan penulis dalam membantu menjelaskan fenomena China melakukan kerjasama dengan ASEAN untuk meningkatkan perekonomian perdagangan bebasnya. Teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah ini lebih memfokuskan pada Kepentingan Nasional. Konsep Kepentingan Nasional adalah konsep yang paling umum digunakan dalam pembahasan politik luar negeri. Konsep ini dipakai sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku suatu negara dalam Politik Internasional. Kepentingan Nasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton adalah tujuan mendasar serta faktor yang menentukan dan memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum, tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi.

V. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk

memberikan penjelasan suatu implementasi Kerjasama ACFTA – ASEAN dalam kepentingan nasional di Indonesia. Jenis Penelitian yang digunakan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu Studi Literatur atau Studi Kepustakaan. Studi Literatur merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam mengumpulkan segala bentuk informasi dan data dengan berbagai macam materi yang ada di literatur seperti Buku, Dokumen, Media Sosial serta Artikel – artikel Jurnal serta Web yang diketahui dari validasinya. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah sumber kepustakaan yang diperoleh data berupa informasi secara teoritis. Hasilnya adalah berbentuk data sekunder atau data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan dari beberapa sumber yaitu Jurnal, Beita, Artikel dan Media Sosial serta berbagai Literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.

PEMBAHASAN

Dinamika ACFTA-ASEAN dan Pengaruhnya di dalam Berbagai Negara di Kawasan Asia Tenggara

Pada perkembangannya kerjasama ACFTA membawa keuntungan dari kedua belah pihak antara ASEAN maupun Tiongkok. Seperti pada tabel dibawah ini yang mengindikasikan pada nilai ekspor diantara kedua pihak yang secara terus menerus naik pasca adanya ACFTA. Nilai Ekspor Tiongkok pada awalnya hanya menyentuh diangka US\$ 50 miliar pada tahun 2000, namun berhasil meningkat hingga ke titik US\$ 292 miliar. Sejalan dengan nilai ekspor ASEAN yang pada awalnya hanya menyentuh US\$ dibawah 50 Miliar pada dekade awal 2000an dan pada 2016 meningkat ke titik US\$ 183 Miliar. Nilai investasi ini terus menerus meningkat secara konsisten yang dapat dilihat dibawah tabel ini.

Pada tabel di bawah tercermin bahwa negara – negara di ASEAN dapat

naik signifikan dalam hal peningkatan bidang ekonomi, SDM (Sumber Daya Manusia) dan perkembangan teknologi yang berelevansi mengikuti perkembangan ekonomi yang ada. Hal inilah yang mendasari bahwa ASEAN dapat bekerjasama dengan Tiongkok.

No .	Tahun	Investasi ASEAN di Tiongkok	Investasi Tiongkok di ASEAN
1.	2006	3,4	0,3
2.	2007	4,4	1,0
3.	2008	5,5	2,5
4.	2009	4,7	2,7
5.	2010	6,3	4,4
6.	2011	7,0	5,9
7.	2012	7,1	6,1
8.	2013	8,3	7,3
9.	2014	6,3	7,8
10.	2015	7,6	8,3

Tabel 2.1 Nilai Investasi Tiongkok di ASEAN dan Sebaliknya.

Dinamika yang terjadi pada Kerjasama atau Hubungan antara Tiongkok dengan Perhimpunan Bangsa – Bangsa di Asia Tenggara (ASEAN) dan negara anggota dibawahnya telah tercermin adanya perubahan yang signifikan selama hampir dua dekade terakhir. Kerjasama Tiongkok – China akhirnya muncul pada tahun 1970an, mayoritas didorong pada sikap keprihatinan bersama atas keinginan Vietnam yang terus berusaha dalam pendirian hegemoni di Indonesia dan Tiongkok ditambah dengan adanya Invasi Vietnam ke Kamboja. Thailand

dalam hal ini juga mempunyai pengaruh yang kuat dalam penyelesaian konflik di Kamboja. Dinamika Thailand terus mengembangkan berbagai hubungan dalam aspek – aspek kemiliteran dengan Tiongkok. Diiringi hal tersebut disisi lain Tiongkok pun lambat laun menghegemoni ASEAN dalam pencarian penyelesaian masalah Politik di Kamboja yang pada akhirnya didukung oleh posisi dari pemerintahan koalisi di Kamboja.

Setelah dekade tersebut berbagai Kebijakan Tiongkok ke Asia Tenggara terus mengalami perubahan penting kedalam lini – lini kehidupan penting di dalam masyarakat. Seperti menaruh ikatan hubungan ideologis dengan implementasinya meneruskan pemberontakan komunis di berbagai kawasan di Indo-China. Pada tahun sembilan puluhan pun, Tiongkok mengeluarkan suatu kebijakan terkait proses dari Kewarganegaraan yang berisi bahwa warga negara Tiongkok yang tinggal diluar negeri dalam konteks ini adalah tinggal di Asia Tenggara dapat pengadopsi dalam hal kewarganegaraan. Terlihat dari hal tersebut bahwa hubungan bilateral Tiongkok dengan Negara – negara di Asia Tenggara makin membaik dan mesra.

Dalam dinamikanya terdapat sembilan kerangka perjanjian dalam hal perjanjian ACFTA antara Tiongkok dengan Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN, yang tercermin pada tabel dibawah ini:

Waktu Perjanjian	Nama Perjanjian
6 November 2001	<i>ASEAN China Comprehensive Economic Cooperation</i>
4 November 2002	<i>Framework Agreement on Economic Cooperation Between the ASEAN and China</i>
29 November 2004	<i>Trade in Goods Agreement and Dispute Settlement Mechanism Agreement</i>
8 Desember 2006	<i>Amandement Protocol Framework Agreement</i>

Januari 2007 *Trade in Services Agreement*

Juni 2009 *Agreement of Investment China – ASEAN 2009*

Dalam penjelasan kerangka dari dinamika Perjanjian ACFTA yaitu yang pertama adalah³; (1) perjanjian ini membentuk suatu kawasan dari Liberalisasi Perdagangan dalam kurun waktu sepuluh tahun yang didalamnya memuat penghapusan tarif Bea dan Non-Bea serta dari hambatan lainnya yang mengganggu jalannya ekonomi;

(2) Dari negara – negara ASEAN yaitu Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand dan Malaysia bersama – sama menyetujui dari kerangka kerja kerjasama yang membahas tentang ekonomi yang komprehensif pada adanya pasar bebas yang berlaku mulai pada tahun 2020. Sedangkan negara – negara lainnya seperti Vietnam, Kamboja, Laos serta Myanmar Pasar bebas ini akan mulai berlaku pada awal dari tahun 2015;

(3) Menyetujui tentang adanya memperkuat dari Kerjasama Prioritas di Asia Tenggara dengan China yaitu Pertanian, Teknologim Informasi serta pengembangan pembangunan di sepanjang sungai Mekong. Dalam hal tersebut Kerangka kerjasama antara China dengan ASEAN dapat memperkuat Kerjasama Ekonomi.

(4) Kawasan Perdagangan Liberalisasi atau bebas ASEAN dengan Tiongkok memiliki suatu potensi besar dengan 1,7 miliar hidup di kawasan ini dan nilai produk bruto yang mencapai 1,5 triliun US\$ sehingga adanya implementasi kearah perkembangan.

(5) ASEAN-Tiongkok dengan memaknai suatu hal yang progresif akan

³ Arimbhi, P., & Hutapea, Y. (2016). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ACFTA (ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA) DI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 3(1), 24-41.

mengurangi dari hambatan tarif dan non tarif pada perdagangan bebas barang yang mudah rusak ke arah kemajuan dari kualitas produk layanan.

(6) ASEAN-Tiongkok sepakat pada pembentukan Rezim Investasi yang terbuka secara komprehensif yang mendapat dukungan oleh Prosedur Keimigrasian yang lebih natural dan luwes. Serta Tiongkok akan memberikan tarif yang lebih menguntungkan untuk tiga negara yang dianggap masih dalam tahap berkembang yaitu Kamboja, Myanmar serta Laos.

Pembentukan ACFTA ditinjau dari Perspektif Historis atau Sejarah

Jauh sebelum adanya negara – negara dengan konsep modern saat ini. Hubungan antara negara – negara di regional ASEAN dengan Dinasti Tiongkok secara historis telah dicatat sejak lama. Apalagi pada negara asia tenggara secara individual sudah terjalin pada saat orang – orang Tiongkok berdiaspora atau menjelajahi berbagai negara di kawasan Asia Tenggara.⁴ Diaspora ini terjadi pada 1405 hingga 1433 yang pada saat itu Tiongkok dikuasai oleh Dinasti Ming. Dibawah komando Zheng He masyarakat Tiongkok secara umum ditugaskan untuk menjelajahi kawasan Asia bagian Tenggara untuk melakukan hubungan ekonomi perdagangan.

Setelah ratusan tahun melakukan perdagangan mulailah pada abad ke – 19 untuk dilakukan pertama kali perdagangan modern yang dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan ini sebagai berikut;

a. Perdagangan 1960 – 1990an

Tahap ini ditandai dengan dimulainya perdagangan modern yang tidak mulus pada awalnya, karena masing – masing dari pihak Tiongkok maupun ASEAN saling menanamkan rasa kecurigaan

⁴ Rakhmat, M. Z., Tarahita, D., Permadi, D. R., Pashya, M. H., Purnama, Y., & Juan, M. F. T. V. (2020). *Ekonomi Politik Hubungan Indonesia-Tiongkok 2020*. INDEF.

masing – masing terhadap pihak satu sama lainnya. Tiongkok yang secara harfiah dikatakan bahwa bangsa Komunis menaruh rasa curiga terhadap dibentuknya ASEAN pada tahun 1967 yang diperpolitikan regional sebagai ancaman dari bangsa barat. Hal ini karena beberapa dari negara ASEAN merupakan anggota organisasi regional dibawah barat seperti negara Amerika Serikat dan Inggris seperti Filipina yang menjadi anggota *Collective Defence Treaty* serta SEATO yang diikuti oleh Thailand dan Vietnam Selatan serta *Five Power Defence Arrangement* yang Malaysia dan Singapura menjadi anggotanya. Namun dipihak ASEAN juga menaruh rasa curiga karena hadirnya Tiongkok tujuan utamanya adalah untuk menyebarkan paham – paham Komunis seperti di Laos, Kamboja, Myanmar serta Vietnam Utara.

Namun arah perubahan terjadi antara ASEAN serta Tiongkok telah merevolusi negaranya dibawah Deng Xiao Ping yang membuat perubahan politik serta Ekonomi. Langkah besar ini ditandai dengan dibukanya kesempatan seluas – luasnya untuk investasi asing masuk ke negara Tirai Bambu tersebut yang diimplementasikan bahwa Tiongkok membuka peluang asing negara ASEAN pada akhir dekade 70an. Hal ini menandai bahwa Tiongkok memperbaiki hubungannya dengan ASEAN hingga periode 1974 hingga 1975an Tiongkok mulai berhubungan dengan diplomatik ke berbagai negara dengan tujuan memulai interaksi hubungan internasional yaitu; Malaysia, Filipina serta Thailand yang pada awalnya saling menaruh rasa kecurigaan akibat perbedaan ideologi.

b. Tahap kedua Tahun 1991 hingga 2001

Pada tahap ini telah dimulai dinamika hubungan ASEAN dengan

Tiongkok mulai bergerak ke arah yang lebih positif. Hal ini didasarkan pada Tiongkok dinegaranya mempunyai suatu kebijakan bernama *Economic Considerations* atau peningkatan ekonomi yang bertujuan mendapatkan kesejahteraan antara Tiongkok dengan negara lainnya melalui hubungan ekonomi yang harmonis. Hubungan ini dilihat secara nyata dimulai ketika Tiongkok telah berupaya untuk menjadi mitra dialog resmi ASEAN yang berimplikasi pada pembentukan perjanjian bilateral yang bergerak pada fokus Investasi dan Perdagangan.

Tiongkok mulai bergabung kedalam forum – forum resmi Internasional yaitu AMM Ke- 24 yang diwakili oleh PM (Perdana Menteri Tiongkok) pada saat itu Qian Qichen dengan harapan bekerjasama secara masif antara ASEAN dengan Tiongkok. Keinginan tersebut diterima baik oleh pihak ASEAN hingga penunjukan negara Tiongkok menjadi Mitra Dialog yang hal itu menjadi sebuah batu loncatan untuk tujuan meningkatkan kerjasama yang lebih luas serta komprehensif diberbagai aspek. Hingga 2001 dibentuklah organisasi yang ditandatangani antara ASEAN dengan Tiongkok bernama *Comprehensive Economic Cooperation* di Bandar Seri Begawan ibukota Brunei Darussalam.

Tahap ketiga tahun 2002 – 2007 dilakukan sebuah negosiasi yang dibentuk atas kerjasama yang lebih luas didalam organisasi dibawah ACFTA yang mulai disetujui dari dua pihak antara ASEAN dengan Tiongkok yang diteruskan pada tahun 2010 yang merupakan implementasi perdagangan area bebas. Kemudian 2005pun mulai diberlakukan EHP yang secara bertahap. Perjanjian tahap ketiga ini merupakan penguat bagi hubungan antara ekonomi ASEAN–

Tiongkok. Meningkatnya hubungan ini berdampak pada hubungan perdagangan yang keduanya semakin tumbuh dengan pesat semenjak tahun 1995. Dimana pada jangka waktu 15 tahun total perdagangan di ASEAN telah meningkat secara signifikan hingga menyentuh angka >12%.

Secara umum perkembangan dari aspek Historis dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini yaitu;

No	Tahun	Dinamika
1	1960-an	Hubungan antara ASEAN dengan Tiongkok ditandai dengan adanya rasa saling curiga di antara kedua belah pihak
2.	1970-an	Tiongkok mulai berubah dibawah kepemimpinan Deng Xiao Ping yang membuka seluas – luasnya Investasi Asing kemudian mendekati negara – negara di ASEAN.
3.	1974 – 1975	Tiongkok mulai hubungan diplomatik dengan beberapa negara Asia Tenggara.
4.	1991	Tiongkok masuk umenjadi mitra AMM (<i>Asean Ministerial Meeting</i>) yang berfungsi sebagai Mitra Konsultasi.
5.	1996	Dimulainya Tiongkok menjadi Mitra Dialog forum resmi negara – negara ASEAN yang menandai kerjasama yang lebih sistematis dan komprehensif.
6.	2001	<i>ASEAN – CHINA Comprehensive Economic Cooperation</i> dibentuk sebagai bentuk implementasi keseriusan Tiongkok untuk melakukan hubungan ekonomi dengan ASEAN di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam.

7.	2002 – 2007	Negosiasi pendandatangan <i>Framework Agreement</i> yang memulaidiberlakukannya EHP sebagai implementasi organisasi ACFTA.
8.	2010	Perjanjian area bebas ACFTA diberlakukan antara ASEAN – Tiongkok.

Pembentukan organisasi internasional lebih tepatnya pada skala Multilateral merupakan suatu perjanjian perdagangan yang dibentuk dari beberapa gabungan negara – negara ASEAN serta ditambah dengan negara Tiongkok sebagai basis dari ekonomi benua Asia. Tujuan dari pembentukan ACFTA pada awalnya adalah menjadikan suatu kawasan perdagangan bebas dengan pengurangan hingga menghilangkan dari segi aspek ekonomi lebih tepatnya adalah perdagangan. Baik hambatan berupa eksternal maupun internal.

Pada awalnya kerjasama Multilateral ini yang bergerak dibidang perdagangan mengedepankan skema *Free Trade Area* atau area perdagangan yang bebas antara negara Tiongkok dengan Asia bagian Tenggara yaitu organisasi ASEAN. Hubungan ini sendiri diawali pada bergabungnya Tiongkok kedalam ASEAN *Ministerial Meeting* atau AMM pada sekitar tahun 1996 kemudian hal ini menjadi sebuah pintu masuk Tiongkok untuk terus bekerjasama dengan Asia Tenggara yaitu menjadi mitra dialog pada AMM ke – 29 di Jakarta. AMM ini sendiri berfokus pada berbagai isu, yaitu bergerak pada Politik, Ekonomi dan Keamanan. Kemudian Tiongkok meneruskan hubungan dengan Asia Tenggara dengan terlibat dalam hubungan kerjasama dan tiga negara lainnya yaitu Jepang, Korea Selatan, atau biasa disebut ASEAN+3 atau APT. Konferensi ini pertama kali diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 1997 yang pada saat itu

sedang dihadapkan dengan momentum krisis moneter yang sedang menghancurkan segi ekonomi Asia.

Pembentukan Konferensi APT ini pada awalnya diprakarsai oleh Pemimpin Korea Selatan yaitu Presiden Kim Dae Jung yang berpendapat bahwa untuk sekiranya memperluas anggota kelompok regional antara Asia Tenggara kemudian ditambah Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan kedalam Organisasi ASEAN+3. Tujuan ini untuk bersama – sama keluar dari krisis ekonomi yang mendorong pertumbuhan perekonomian ASEAN pada tahun 1997 yang pada saat itu hampir diseluruh ASEAN telah mengalami krisis ekonomi yang parah.

Tidak hanya hal tersebut motivasi dari pembentukan ASEAN+3 ini dengan menjawab adanya tantangan dari globalisasi yang kian dinamis dan masif serta hal ini harus dimanfaatkan oleh anggota organisasi ini untuk keuntungan dari perkembangan adanya perubahan tersebut. Hubungan yang terbangun dengan baik juga berdampak pada masa depan negara – negara yang menjadi anggotanya. Hal ini berimplikasi pada ASEAN dan China yang mulai ditingkatkan lagi dengan membentuk kerjasama yang menyeluruh pada aspek ekonomi kedalam kerjasama perdagangan yang bebas dengan dinamakan ACFTA atau *ASEAN – China Free Trade Agreement*).

Pembangunan Nasional di Indonesia dalam Implementasi ACFTA

Pelaksanaan ACFTA di Indonesia ditandai dengan konsistensi terhadap Perjanjian tersebut serta adanya konsistensi bangsa Indonesia dimata Internasional dengan terbitnya Keputusan Presiden lewat Kepres Nomor 48 Tahun 2004 sebagai bentuk pengesahan ACFTA. Hal tersebut mengindikasikan

bahwa Indonesia telah secara konkrit sepakat dengan penuh. Penetapan dari Tarif Bea masuk sebesar 0% terhadap barang – barang di Indonesia yang telah disahkan lewat Kementerian Keuangan yang diatur lewat PERMEN (Peraturan Menteri) yaitu Permenkeu No 235/PMK 011/2008 tentang penetapan tarif bea dalam rangka meneruskan program ACFTA.

Kerjasama ACFTA khususnya di Indonesia telah menghasilkan peningkatan tren positif perdagangan diantara kedua negara. Dalam kerangka perjanjian Indonesia dengan China banyak menghasilkan hubungan “Simbiosis Mutualisme” atau *Preferential Treatment*⁵ dengan fokus terhadap tiga hal yaitu; (1) sektor barang, jasa serta investasi dengan berfokus pada memacu percepatan aliran barang distribusi ekspor serta impor, jasa dan investasi diantara kedua negara tersebut sehingga membentuk suatu kawasan perdagangan bebas.

Apalagi pada era Kepemimpinan Joko Widodo, hubungan Indonesia dengan Tiongkok tidak akan bisa dilepaskan satu sama lain, hal ini dimaksud bahwa eratnya hubungan antara kedua negara ini.⁶ Tiongkok memiliki posisi penting dan strategis dalam politik dan ekonomi di Indonesia. Sinyal kuat hubungan ini terus berlanjut setelah kedua kepala negara yaitu Jokowi dan Xi Jinping membahas pada fokus masalah pembicaraan pada bidang ekonomi khususnya sektor perdagangan, infrastruktur, industri, pariwisata, keuangan hingga hubungan antar masyarakat. Implementasi tersebut dapat dilihat pada penyepakatan MoU. Pada hal ini tercermin kerjasama Tiongkok untuk pembangunan kepentingan Nasional di Indonesia adalah:

- a. MoU Kerjasama Pembangunan Industri serta infrastruktur antara Komisi Nasional Pembangunan Tiongkok dengan Kementerian

⁵ *Preferential Treatment* merupakan perlakuan khusus yang lebih mengedepankan pada saling menguntungkan kedua negara dibanding perlakuan yang diberikan kepada negara lainnya yaitu non-anggota selain negara tersebut.

⁶ Rachmadito, R.P. (2020). *Kompetisi produk lokal Indonesia dan produk Cina Pasca ASEAN-China Free Trade Area (CAFTA): Studi kasus produk aksesoris elektronik di CV. Makmur Jaya Engineering* (Doctoral Dissertation, Universitas Pelita Harapan).

BUMN;

- b. MoU antara BASARNAS RI atau Badan SAR Nasional dengan Kementerian Transportasi Tiongkok;
- c. MoU Kerjasama Komisi Pembangunan Nasional RI dengan Tiongkok pada fokus infrastruktur proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta – Bandung;
- d. MoU antara Kementerian BUMN dengan Pemerintah Tiongkok dengan fokus perbankan yaitu membentuk *Development Bank Corporation*;
- e. MoU pada ekonomi Pajak antara Kementerian Keuangan dengan Pemerintah Tiongkok pada fokus masalah Pencegahan Pajak Berganda.

Selain hal tersebut peningkatan Investasi Tiongkok pun dilakukan diberbagai sektor Ekonomi dengan tujuan Peningkatan dari Sumber Daya Alam serta Sumber Daya Manusia yang berfokus pada berkelanjutan pembangunan yaitu;

- a. *Aluminium Corporation of China Ltd* (Chinalco) dengan PT Antam Tbk serta PT Inalum dengan membangun suatu *Smelter Grade Alumina* sebagai bentuk peningkatan ekspor dari Aluminium senilai US\$ 1,5-1,8Miliar di Mempawah, Kalimantan Barat;
- b. Investasi PT KS ORKA pada peningkatan Panas Bumi sebesar US\$ 1Miliar;
- c. Pengembangan dari Industri Konversi *Dimethly Ethercoal* dengan

mengubahmenjadi Gas siap pakai sebesar US\$700 juta.⁷

Perjanjian ACFTA memberikan perkembangan yang lebih banyak terhadap kedua negaratersebut karena menghasilkan pada Defisitnya Keuangan negara Indonesia. kenaikan ini ditandaiddi era kepemimpinan Joko Widodo yang signifikan, Tabel dibawah ini akan menampilkan secararinci pada naiknya Ekspor – Impor Tiongkok dan Indonesia, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.4 Ekspor – Impor Tiongkok dan Indonesia Periode 2015 – 2019

No.	Tahun	Ekspor Indonesia - Tiongkok	Impor Tiongkok - Indonesia	Defisit
1.	2015	15.046,4	29.410,9	-14.364,5
2.	2016	16 790,8	30 800,5	-14 009,7
3.	2017	23 083,1	35 766,8	-12 683,7
4.	2018	27 132,2	45 537,8	-18 405,6
5.	2019	27 961,9	44 907,9	-16 966,3

Sumber: Badan Pusat Statistika (BPS)

Perjanjian ACFTA ini diibaratkan sebagai dua koin mata yang saling berbeda satu sama lain, tidak hany memberikan suatu dampak positif, namun perjanjian ini juga pasti menimbulkandampak negatif yaitu kesenjangan sosial, lesuhnya UMKM di Indonesia. Namun suatu dampak tersebut sudah terlanjut disepakati dan untuk selanjutnya sebagai masyarakat yang terdidik, diharuskan memiliki sikap yang bijaksana dengan cara peningkatan Indonesia yang semakin tangguh.

Kondisi perekonomian Indonesia yang terkesan terbuka dapat mempengaruhi prinsip ekonomi global serta Liberalisasi Perdagangan, karena

⁷ Firdaus, R.S. (2019). *Khasanah Kedaulatan dalam Regionalisme di Era Globalisasi: Studi Kasus Implementasi ACFTA di Indonesia*. Jurnal Ketahanan Nasional, 19 (2).

ekonomi di Indonesia akan terkena dampak langsung di bidang ekspor, impor investasi langsung serta tidak langsung dan pinjam meminjam.

Kepentingan Indonesia dalam Mendukung Kerjasama ACFTA-ASEAN urgensi dalam Bidang Politik

Dinamika perdagangan bebas (*Liberalization of Trade*) pada saat ini yang merupakan suatu bentuk ACFTA yang dimana harus didukung pada kebermanfaatan kepentingan Politik secara keseluruhan. Karena dengan dilihat dari Pertumbuhan negara Tiongkok yang relatif pesat saat ini menjadikan Tiongkok sebagai kekuatan Politik yang patut diperhitungkan Indonesia dan negara – negara anggota ASEAN. Kebangkitan Tiongkok sebagai salah satu raksasa ekonomi yang saat ini dapat dimanfaatkan oleh Indonesia dalam kerangka ACFTA. Negara – negara yang telah menjadi anggota perjanjian didalam ACFTA saling memberikan *Preferential Treatment* di tiga sektor yakni yaitu sektor barang, jasa serta investasi berelevansi dengan percepatan aliran barang, jasa dan investasi yang diantaranya negara – negara anggota dapat terbentuk kedalam suatu kawasan perdagangan bebas.

ACFTA pada dasarnya di Indonesia bukan sekedar hanya konsep semata melainkan telah menjelma sebagai suatu sebuah realitas politik serta ekonomi. Secara Politik, ACFTA merupakan puncak keputusan strategis yang para pemimpin negara – negara ASEAN yang berani mengambil keputusan ditengah kuatnya arus regionalisasi yang mencotok pada model Uni Eropa (UE) dan semakin menguatnya globalisasi.

Dalam dinamika perjalanan ACFTA (ASEAN – CHINA FREE TRADE) di Indonesia pada dasarnya telah banyak mempengaruhi berbagai dari kegiatan Politik. ACFTA yang telah dilakukan dari satu dekade kebelakang yang dimana tongkat kepemimpinan Politik di Indonesia sudah dua kali masa transisi pergantian Presiden yaitu SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) Jilid I

dan Jilid 2 dan Joko Widodo Periode Jilid 1 dan sedang berlangsung kedalam jilid 2 yang dimana perbedaan mendasar ini memiliki latar belakang kepentingan politik luar negeri yang sangat memiliki perbedaan.

Fokus Politik luar negeri di Indonesia pada Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah dilakukan dalam implementasi demokrasi domestik dengan slogan ‘*Thousand Friends, Zero Enemy*’ dalam perkembangan politik luar negerinya yang mencari teman diplomatik sebanyak – banyaknya dari berbagai negara di dunia dan sangat meminimalisir musuh – musuh apalagi memutus hubungan diplomatik.⁸ Dengan slogan dari *Thousand Friends, Zero Enemy* tentunya sangat memiliki pengaruh kuat terhadap politik luar negeri yang pada akhirnya membuka peluang kerjasama dan diplomasi Indonesia didalam kancah internasional. Dalam hal ini juga mempengaruhi kerjasama dengan kesepakatan penandatanganan MoU ACFTA pada masa kepemimpinan dengan SBY – Tiongkok.



Gambar 3.1 Pembahasan ACFTA Kanan Presiden Tiongkok (Xi Jinping) – Kiri

⁸ Hidayat, M.N. (2018). Analisis Kebijakan Pemulihan Citra Indonesia pada Masa Kepemimpinan Presiden SBY. *Jurnal Administrative Reform*, 5 (4), 227 – 242.

Presiden Indonesia (Susilo Bambang Yudhoyono)

Dinamika hubungan antara Indonesia – Tiongkok pada masa SBY memiliki hubungan harmonis dengan dilakukan penandatanganan Kemitraan Strategis (*Strategic Partnership*) di Jakarta pada tanggal 2005 oleh Presiden China, Hu Jintao yang pada saat ini sedang memperingati 50 Tahun KAA di Bandung. Kemitraan strategis politik ini telah membuat kerjasama kedua negara ini semakin berkembang pesat yang ditandai beberapa capaian penting, yaitu:

Tabel 2.5 Dinamika Kerjasama Politik Zaman Susilo Bambang Yudhoyono
(2004 -2009 dan 2009 -2014)

No	Bentuk Kerjasama	Tahun Kerjasama
1.	Pembentukan mekanisme dialog tingkat Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (MENKOPOLHUKAM) dengan dewan negara (<i>State Councillor</i>)	Juli 2005
2.	Forum Konsultasi Kerja sama Maritim	Desember 2006
3.	Persetujuan tentang Kerjasama Aktivitas dalam Bidang Pertahanan	Desember 2007
4.	Perjanjian Ekstradisi	Juli 2009
5.	Pertemuan Dialog kedua Tingkat tingkat Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (MENKOPOLHUKAM) dengan dewan negara (<i>State Councillor</i>)	Januari 2010
6.	Penandatanganan <i>Plant of Action</i> (<i>PoA</i>)	Januari 2010
7.	Deklarasi bersama Tiongkok – Indonesia melalui ACFTA dengan rencana	

	program kegiatan konkret sebagai implementasi butir kesepakatan (2010 – 2015)	
8.	Kunjungan balasan Presiden RI ke China	22 – 24 Maret 2012

Politik luar negeri Indonesia yang dibawa oleh Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhono) menampilkan Indonesia sebagai sosok politik yang *high profile*. Hal ini dapat dilihat secara nyata bahwa Indonesia telah mengikutsertakan di dalam forum G-20 secara umum yang tidak saja sebagai ekspresi pengakuan dunia terhadap dari *grow economic* Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir, namun sebagai bentuk dari rencana dan *grand design* pemerintah, termasuk didalamnya adalah Kementerian Luar Negeri.

Secara dinamika dalam hal administratif, Presiden SBY pada sejak 2005 telah melakukan berbagai penandatanganan dari kesepakatan *Strategic Partnership* dengan Tiongkok di Beijing. Kesepakatan ini telah memuat kerjasama Indonesia – Tiongkok kedalam hal berkemajuan dan semakin luas. Tidak hanya bergerak pada bidang tertentu seperti Ekonomi namun telah merambah kedalam aspek lainnya seperti salah satunya adalah Politik. Pada Januari 2010 telah dilakukan ratifikasi untuk lima tahun rencana atau *Five year plan of Action* yang bertujuan pada penyusunan mekanisme dialog bilateral pada urusan teknis kerjasama yang merupakan tingkat urusan regional dan Internasional serta untuk menyusun rencana dari Rancangan Anggaran Pembiayaan Kerjasama.

Kerjasama Indonesia dengan Tiongkok dinamika dalam ACFTA telah menghasilkan perjanjian yang penting dimana Kerjasama Indonesia dan Tiongkok telah mengalami *trend* positif pada perdagangan antara kedua negara yang berimplikasi terhadap politik yang positif juga. Kerjasama Indonesia pada ACFTA (ASEAN-China Free Trade Agreement) yang sudah terjalin sehubungan dengan keanggotaan Indonesia dalam ASEAN yang otomatis

masuk ke dalam ACFTA. Di era Presiden SBY selain fokus pada demokrasi domestikpun fokus kedalam organisasi dunia internasional.

Selain hal tersebut secara dinamika Politik, kemitraan ACFTA yang memanfaatkan forum – forum investasi ekonomi yang salah satunya adalah *Free Market* yaitu ACFTA telah membantu Indonesia keluar dari tekanan negara – negara Utara, yang cenderung pada pengabaian kesetaraan serta prinsip mutual *agreement* dalam hubungan dengan Indonesia. presiden SBY pun yakin bahwa Tiongkok mampu untuk menjadi pionir *Asian Century* atau terjalin dinamis dan harmonis antara pemerintahan, dunia usaha serta masyarakat. Satu jalinan yang berlandaskan kepercayaan, sikap saling menghormati pada kedua antar negara dan saling memahami antar budaya yang dimana mempunyai kepentingan masing – masing. Dalam pertemuan Indonesia – Tiongkok yang pada 2005 dengan bertema *Indonesia-China Business Luncheon* ini, telah dihasilkan suatu kesepakatan dari penandatanganan antara Indonesia dengan Tiongkok dengan berlandaskan prinsip timbal balik saling menghormati dan saling memberi kebermanfaatan satu sama lain.

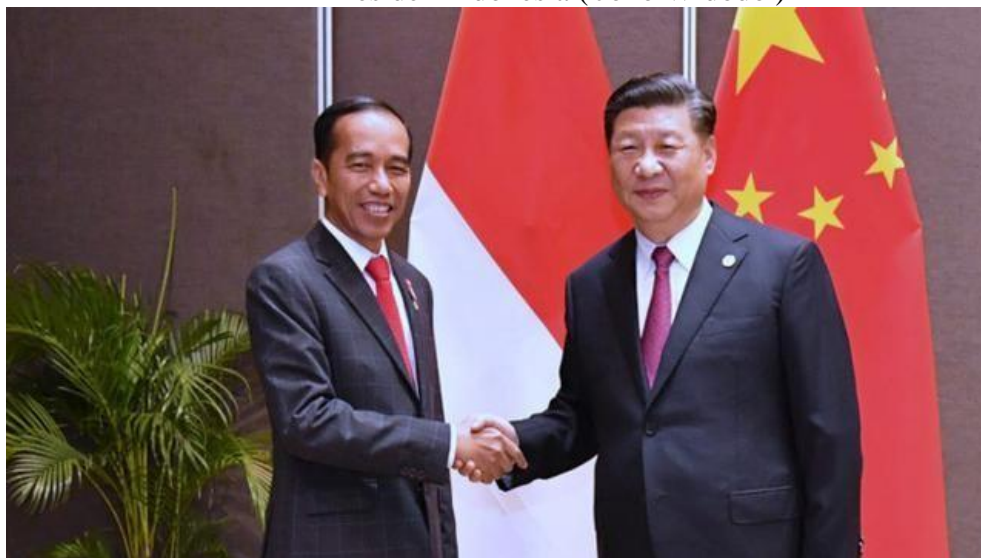
Dinamika pada Era Joko Widodo pada Politik ACFTA Indonesia – Tiongkok

Hal ini dimaknai sebagai wujud dari pandangan Presiden Jokowi yang publik menilai pada Presiden Jokowi sebagai lebih memfokuskan pada dinamika dalam negeri dalam kerja sama Internasional. Perbedaan itulah yang menjadi suatu dasar dari presiden SBY. Pada pemerintahan Jokowi kecepatan pembangunan dan pemerataan pembangunan lebih memfokuskan dengan hal tersebut. Fokus dari Politik luar negeri Jokowi pun memprioritaskan pada isu – isu ekonomi yang memberikan kebermanfaatan secara realitas dalam masyarakatan pembangunan di Indoneia. Selain *Free Trade Agreement* (FTA) serta *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA), *Preferential*

Trade Agreement (PTA) dan akan memulai suatu perundingan yaitu *BIT (Bilateral Investment Treaty)*.

Sinyal kuat pergeseran politik luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok. Perhatian Presiden Joko Widodo terhadap Tiongkok sudah ditunjukkan sejak masa awal jabatan. Secara dinamika yang terjadi, Tiongkok merupakan negara pertama kali yang dikunjungi Joko Widodo pada tanggal 8 November 2014. Peningkatan hubungan Indonesia – Tiongkok juga dapat dilihat dalam momen perayaan 65 tahun hubungan Bilateral Indonesia – Tiongkok, Jokowi melakukan kunjungan kembali ke Tiongkok pada tanggal 25 – 28 Maret 2015. Kunjungan yang pertama, Jokowi dan Xi Jinping membahas beberapa hal untuk peningkatan hubungan kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok. Dua kepala negara memfokuskan pembicaraannya pada bidang ekonomi khususnya pada berbagai sektor perdagangan, keuangan hingga hubungan antara masyarakat. Sebagai hasil dari kunjunganpun Joko Widodo telah menyepakati berbagai hasil dari kunjungan kerja bersama Xi.

Gambar 3.2 Pembahasan perjanjian Perkuatan Hubungan Bilateral dalam rangka 70 tahun hubungan Tiongkok – Indonesia Kanan Presiden Tiongkok (Xi Jinping)
– Kiri Presiden Indonesia (Joko Widodo)



Kedekatan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping yang semakin erat dinilai seharusnya bisa menguntungkan Indonesia. Salah satunya merealisasikan komitmen negeri tirai bambu atas investasi di Indonesia. Bangsa Indonesia pada dasarnya harus berani meminta agar kegiatan penanaman modal dari investor maupun pemerintah Tiongkok ke Indonesia bukan hanya sekedar nominal semata, namun pada kualitas investasi tersebut. Sejak negara Tiongkok telah berkembang pesat menjadi haluan negara yang terbuka pada dekade 90an maka Indonesia sendiri mempunyai berbagai kepentingan selain ekonomi, Investasi dan Perdagangan dengan negara Tiongkok. Indonesia pun mempunyai kepentingan politik. Jalinan ekonomi dan politik ini kemudian diimplementasikan melalui sebuah bentuk kerjasama regional ASEAN dengan Tiongkok. Hal ini hanya akan membuat pertumbuhan ekonomi Tiongkok semakin pesat.

Kepentingan Ekonomi (Indonesia – Tiongkok) sebagai dinamika dalam Fondasi Kerjasama

Negara Tiongkok telah menjelma menjadi salah satu poros ekonomi dunia yang notabeneanya merupakan salah satu mitra dagang terbesar di Indonesia. Tiongkok merupakan negara tujuan ekspor terbesar ke – 4 bagi Indonesia. Berbagai kepentingan Ekonomi antara negara Indonesia yang bergantung kepada Tiongkok yang diwujudkan dalam program ACFTA. Namun hal ini membuat banyak kerjasama yang mendapatkan pro serta kontra, berikut adalah kerjasama ekonomi setelah adanya kerjasama ACFTA ASEAN antara Indonesia – Tiongkok:

1. Kerja sama Kereta Cepat Jakarta – Bandung

Investasi Tiongkok di Indonesia dalam pembangunan rekonstruksi rel kereta api berkecepatan tinggi, energi, maritim, pariwisata dan pengembangan industri pelabuhan. Pada investasi pembangunan infrastruktur kereta api

berkecepatan tinggi. Pada investasi pembangunan infrastruktur kereta api diharapkan pada aspek ini menjadi dalam pembuatannya kereta cepat menjadi fase pertama rangkaian rel kereta yaitu dengan pembuatan *track* 763 KM yang menghubungkan antara Jakarta dengan Kota Surabaya. Jokowi pada implementasi saat ini masih ingin membuat kereta cepat yang dapat menghubungkan seluruh pulau yang ada di Jawa. Program ini memberikan suatu alternatif kereta dengan kecepatan 350 km/h dan saat ini pemerintahan dari Jokowi Dodo telah mempertimbangkan hitung – hitungan secara politik dan hitungan ekonomi dalam waktu manifestasi yang berkelanjutan.



Gambar 3. Rencana Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung

Implementasi dari Program ACFTA dikeluarkan pada Perpres Nomor 3 Tahun 2016 mengenai Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dalam perpres ini mengatakan bahwa Proyek ini akan dilaksanakan dari berbagai elemen yang ada mulai dari pemerintah pusat, daerah hingga badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk meningkatkan pertumbuhan serta

pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan daerah.

Kemudian pada tahun 2017 presiden mengeluarkan Perpres Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Nomor 3 Tahun 2016 presiden tentang percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Proyek dari implementasi cepat Jakarta – Bandung akan diperkirakan menghabiskan dana sekitar 60 hingga 90 triliun rupiah. Kerjasama ini direalisasikan melalui anak usaha BUMN yaitu PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan China Railway Internasional Co. Ltd. Terjalannya hubungan kerjasama Indonesia – Tiongkok membuktikan bahwa kedua negara ini memiliki kemampuan kuat dalam aspek ekonomi serta infrastruktur. Hingga akhir tahun pembangunan ini dicapai baru sekitar 60%.

2. Investasi Morowali

Proyek Morowali yang merupakan sebuah perusahaan dari Tiongkok dengan Indonesia yaitu *Shanghai Decent Investment Group* yang terkenal pada Pengelolaan nikel serta baja.⁹ Berkolaborasi dengan Perusahaan Indonesia



⁹ Juwita, M.R., Wang, T., Sukma, Y.G., Iskandar, M. Supriyadi, A. (2020). Potentials and Challenges of Chinese Foreign Direct Investment in Indonesia. NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam, 17 (2), 195 - 217

yaitu Bintang Delapan Mineral. Proyek ini menelan sekitar US\$980 Juta atau setara dengan hampir Rp. 14 Triliun akan membantu bangsa Indonesia untuk meningkatkan dari produksi bauxitnya hingga 2 sampai 3 juta Ton/tahun. Kawasan Morowali diharapkan dapat membuka jalan Indonesia untuk menjadi produsen Baterai Litium yang dapat dijadikan bahan mentah untuk Industri Mobil Listrik Lokal.

Gambar 3. Investasi Morowali di Sulawesi Tengah

3. Pembangunan Tenaga Listrik

Konsumsi Listrik di Indonesia telah naik. Kebutuhan Listrik diseluruh Nusantara hingga mencapai 95% peningkatan jika dibandingkan tahun lalu.



Pasokan Listrik yang belum merata di berbagai daerah dipelosok nusantara menjadi peluang kerjasama Tiongkok dengan Indonesia untuk berkolaborasi pada pembangunan PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air). Hubungan ini telah diimplementasikan di wilayah Kayan dan Sungai Bahau. Proyek ini menelan nilai investasi Tiongkok hingga diperkerikan sebesar mencapai US\$ 17.8 Miliar.

Gambar 3. Investasi Pembangkit Listrik Tenaga Air Tiongkok di Kalimantan

Utara

Kepentingan Ideologi Indonesia dalam Mendukung ACFTA-ASEAN

Kepentingan ideologi menjadi dinamika yang menarik dalam dukungan Indonesia dengan kerjasama Tiongkok – ASEAN, Karena berangkat dari Hubungan diplomatik Republik Indonesia dengan Republik Rakyat China (RRC) pada saat itu sudah dibuka sejak 9 Juni 1950. November 1953 kemudian ditandatangani perjanjian perdangan pertama di Beijing. Hingga kemudian Perdana Menteri Tiongkok pada saat itu *Zhou Enlai* menghadiri Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada tahun 1955. Namun hubungan yang dekat itu berujung pada perjanjian Dwikewarganegaraan Indonesia – Tiongkok.

Tampak dinamika hubungan yang erat diantara kedua negara ini berubah pada saat momentum terjadinya G30S/PKI pada tahun 1965 yang menjadi titik awal hubungan kedua negara memburuk. Implikasi dari dilihat dari peristiwa 23 Oktober 1967 pada saat Kedutaan Besar Indonesia di Beijing ditutup dan seminggu setelahnya Kedubes Tiongkok di Jakarta pun ditutup. Periode orde baru pada 1966 – 1990 hubungan kedua negara sepakat untuk pembekuan hubungan diplomatik. Pada saat itu kepentingan Indonesia untuk negara Tiongkok diwakili dari Kedubes Kamboja sedangkan Tiongkok diwakili

oleh Kedubes Rumania.¹⁰

Gambar 3. Foto Pemimpin Indonesia dengan Tiongkok (Kanan (Soekarno) –



Dok. Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Tiongkok yang sudah berlangsung di era pemerintahan Soekarno dan Mao.

Kiri (Mao Zhedong)

Hubungan yang memburuk mulai lunak pada 24 Februari 1989 pada saat itu Soeharto bertemu dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok pada saat itu yaitu Qian Qichen, dalam acara upacara pemakaman Kaisar Hirohito di Jepang. Momentum ini akhirnya membahas pada normalisasi hubungan diantara kedua negara yang tengah membeku. Pembahasan ini kemudian dilanjutkan pada pertemuan di Tokyo antara RI – Tiongkok hingga akhirnya pada 1990 kedua Menteri Luar Negeri menandatangani Komunike bersama

¹⁰ Amanda, R. (2021). Hegemoni Di Balik Hubungan Bilateral Tiongkok – Indonesia. *Pamator Journal*, 14 (1), 34 – 39.

yaitu *The Resumption of the Diplomatic Relations Between the Two Countries* di Beijing dan diikuti oleh kunjungan Perdana Menteri Li Peng ke Indonesia sekaligus menyaksikan dari penandatanganan Momenandum Of Understanding (MoU) pemulihan hubungan diplomatik ini dimulai pada 1990 saat pemimpin utama Indonesia yaitu Presiden Soeharto melakukan kunjungan negara balasan ke Beijing sekaligus untuk menandatangani Pembentukan Komisi Bersama Bidang Ekonomi, Perdagangan dan Kerja sama Teknik. Saling kunjung secara intens akhirnya berujung pada Tiongkok yang menjadi mitra dialog secara resmi pada acara ASEAN 1996.

Pertimbangan Ideologi saat ini telah mengalami pergeseran yang signifikan setelah dikalahkan oleh pertimbangan pragmatis yaitu Tiongkok sebagai kekuatan baru di dunia sangat berperan dalam menciptakan sebuah tatanan regional yang dapat merubah apapun jika dikehendaki oleh para pemimpin negeri tirai bambu tersebut. Kemunculan dari sosok negara Tiongkok memiliki berbagai indikator dari pendukung hal – hal yang bertujuan pada pilar – pilarnegara Tiongkok di pergaulan Internasional.

Untuk alasan Indonesia ikut ke dalam sebuah organisasi ACFTA pada dasarnya Tiongkok merupakan negara yang bersifat *Hard Power* yang mampu membuat negara Tiongkok bertransformasi menjadi sebuah negara dari ideologi yang tertutup menjadi negara yang terbuka yang dalam kondisi ini mampu serta siap melakukan berbagai intervensi terhadap negara – negara yang masih ingin berkembang salah satunya adalah Indonesia. dengan begitu Indonesia akan dipaksa kedalam intervensi berbagai kerjasama perjanjian atau kesepakatan dengan Tiongkok. Negara Tiongkok dapat juga bersifat *Soft Power* yang artinya sebagai Implementasi dari aktualisasi kemampuan diplomasi internasional dalam mempengaruhi negara – negara lain. Hal tersebut tercermin pada kepemilikan *hard power* serta *soft power* yang begitu demikian hebat hingga menjadi poros ekonomi dunia baru, Tiongkok kemudian dapat mampu

mengaktualisasinya dengan meningkatkan suatu dari citra negaranya dalam diplomasi internasional yang ditujukan untuk pengaruh pihak lain yang pada konteks ini adalah negara Indonesia.

Peningkatan dari Investasi diyakini dapat memiliki suatu kontribusi sebagai pembangkit terhadap bergeraknya pembangunan dari suatu ekonomi bangsa. Dalam ekonomi Indonesia secara Makro, Investasi Tiongkok dapat berperan sebagai salah satu komponen dari Pendapatan Nasional, yaitu:

a. PDB (Produk Domestik Bruto)

Indonesia selama satu dekade terakhir, dalam hal PDB selalu mengalami peningkatan dengan nilai kisaran 5% dalam setahun. Pada data Badan Pusat Statistik dicatat satu dekade kebelakang nilai PDB riil Indonesia hanya sebesar 6.119,4T rupiah namun terus mengalami padatahun 2018 mencapai 10.425,3T rupiah yang berpotensi pada impor permintaan barang. Selain pendapatan nasional. Dari kegiatan perdagangan ekonomi yang dipengaruhi oleh ACFTA dapat mempengaruhi kurs riil yang merupakan harga realtif dari barang diantara kedua negara antara Tiongkok – Indonesia. Kurs mata uang dalam negeri dapat menyebabkan penurunan nilai impor, begitu sebaliknya. Fungsi nilai kurs ini sebagai suatu alat konversi mata uang dalam negeri ke mata uang asing saat melakukan transaksi dari perdagangan tersebut.

PDB atau Produk Domestik Bruto dalam hal ini merupakan indikator untuk mengukur dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. PDB jumlah dari nilai tambah yang dihasilkan dari komponen – komponen usaha pada suatu negara di periode tertentu. Terdapat dua pendekatan dalam PDB yang pertama adalah PDB sebagai suatu total dari pendapatan semua orang atau individu didalam negara dan yang kedua adalah PDB sebagai total dari pengeluaran atau *output* barang serta jasa dalam perekonomian negara.

PDB sebagai ukuran atau indikator pendapatan nasional Indonesia dapat berfungsi sebagai dari pengukuran untuk meneliti fungsi permintaan impor karena PDB merupakan satu – satunya Indikator yang signifikan secara statistik untuk pengukuran kinerja ekonomi.¹¹ Dalam perdagangan Internasional, permintaan Impor, tingkat dari pendapatan nasional, harga relatif, dan nilai tukar merupakan aspek – aspek penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya impor disuatu negara diantara faktor – faktor potensial lainnya.

Fokus penulisan ini yang menganalisis suatu dampak ACFTA terhadap PDB didalam suatu negara bahwa peningkatan ACFTA telah berpengaruh pada suatu peningkatan impor di negara – negara ASEAN dengan tingkat elastisitas pendapatan yang beragam mulai dari 16,06 hingga 1,36. Elastisitas pendapatan dari Impor yaitu sebagai berikut;

1. Singapura (16%)
2. Malaysia (3,1%)
3. Filipina (1,7%)
4. Thailand (1,4%)
5. Indonesia (5,3%)

Pengaruh dari ACFTA – Tiongkok telah dilihat dari penjelasan diatas bahwa hasil yang positif terhadap impor dari negara – negara Asia Tenggara yang diindikasikan sebagai pengaruh Perdagangan bebas dapat menyebabkan peningkatan di negara - negara ASEAN yang signifikan dalam pemberlakuannya.

b. GDP (*Gross Domestic Product*)

¹¹ Baihaqi, A. (2015). Trade Facilitation dan Kinerja Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil Negara Anggota ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga).

Pertumbuhan ekspor dan pertumbuhan ekonomi secara teori mempunyai hubungan timbal balik yang menunjukkan nilai secara positif. Hal ini dimaksudkan bahwa pertumbuhan net ekspor naik maka diiringi sebagai pertumbuhan ekonomi juga ikut baik dan sebaliknya jika ekspor turun maka pertumbuhan ekonomi pun ikut turun. Demikian dalam hal ini Tiongkok – Indonesia dalam kerjasama ACFTA kedua negara memperoleh hasil yang beragam dalam periode satu dekade terakhir dimana Indonesia diketahui bahwa pertumbuhan ekspor mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sedangkan Tiongkok ada hubungan timbal balik atau hubungan positif antara ekspor dan pertumbuhannya.

GDP atau *Gross Domestic Product*nya dalam hal ini kedua negara antara Tiongkok – Indonesia saling mempengaruhi, kenaikan dari net ekspor dapat meningkatkan GDP atau pertumbuhan ekonomi, namun sebaliknya adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat mampu mendorong kenaikan ekspor riilnya.

Secara sederhana pengaruh dari Investasi terhadap suatu perekonomian negara dapat tercermin dari pendapatan nasional negara, investasi yang berkorelasi pada hal positif dengan GDP, secara general dapat diartikan bahwa jika investasi naik, maka GDP akan cenderung naik pula. Ataupun dalam hal sebaliknya, apabila Investasi turun, maka suatu GDP akan juga cenderung turun. Berbagai dari penelitian ekonomi Indonesia memandang dalam hal ini pembentukan suatu investasi merupakan suatu faktor yang penting pada peran strategis terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia. implementasi ini akan dilihat pada sejumlah modal yang ditanam, ada sejumlah dari pembelian yang dikonsumsi, tetapi dapat digunakan untuk produksi, sehingga menghasilkan barang dan jasa di masa yang akan datang.

Pemberlakuan ACFTA akan berdampak pada *head to head* bersaing yang menggunakan indikator produk industri negara Tiongkok yang memiliki kondisi berlawanan dengan di Indonesia karena pertumbuhan negaranya mampu meningkatkan net ekspor, dalam hal ini net ekspor memiliki kemampuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diwakili oleh suatu nilai GDP yang membuat Tiongkok mempunyai komoditi – komoditi ekspor yang dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran untuk luar negeri.

Suatu negara akan berkembang pada hal dinamis jika investasi yang akan dikeluarkan jauh lebih besar daripada nilai penyusutan faktor – faktor produksinya. Negara yang pada dasarnya memiliki investasi yang lebih kecil daripada penyusunan faktor produksinya pada hal yang berkelanjutannya akan mengalami perekonomian yang stagnan. Tiongkok memandang Indonesia merupakan negara yang dapat dijadikan *partner* untuk kerjasama karena Indonesia merupakan negara berkembang yang notabeneanya mengalami perekonomian yang sedang berkembang pula, dari hal itu maka Indonesia berdampak pada nilai positif dengan menurunnya jumlah pengangguran dan kemiskinan. Kondisi ini akan diikuti pada peningkatan ekonomi yang menjauhkan dengan adanya suatu konsep dari inflasi, sehingga perekonomian negara menjadi berkembang. Karena pada dasarnya jika suatu negara mengalami perekonomian yang stagnan akan dihindari pula bagi para perencana dari kerjasama Internasional. Untuk hal tersebut maka formulasi dari suatu kebijakan ekonomi yang berangkat dari ideologi yang pro investasi didorong pada peningkatan ekonomi guna mengatasi masalah stagnansi, sekaligus untuk membalikan perlambatan ekonomi agar pertumbuhan dari suatu pertumbuhan ekonomi terus menggeliat, kemudian akan menyerap tenaga kerja dan menekan kemiskinan yang bermuara pada pemacuan perbaikan

tingkat kesejahteraan rakyat secara keseluruhan dimana, cita – cita dari ideologi Indonesia yaitu Pancasila dengan berdasrakan kepada UUD 1945 alinea ke 3.

Kepentingan Citra Indonesia pada Pergaulan Internasional dalam Dinamika Perjanjian ACFTA

Walaupun pada dinamika Indonesia masih terlalu dini untuk partisipasi aktif dalam asosisasi negara – negara. Dengan kekuatan ekonomi tersebut dapat memberi suatu ruang yang lebih besar bagi Indonesia untuk turut serta dalam penentuan kebijakan regulasi serta merekonstruksi ekspektasi – ekspektasi global tentang kerjasama, pembangunan dan keamanan Internasional.

Dalam suatu kerjasama ASEAN – Tiongkok yang diimplementasikan ke dalam ACFTA yang notabenenya Indonesia merupakan salah satu negara dari organisasi ASEAN pastinya padadasarnya memiliki suatu tujuan untuk keberhasilan dari kepentingan nasional yang mana kepentingan nasional dalam hal ini merupakan *concern* dari perekonomian Indonesia yang sudah dijelaskan pada perdagangan bebas yang mendorong Indonesia ke globalisasi ekonomi yang mendorong negara Indonesia untuk ikut kedalam arah kemajuan ekonomi.¹² Untuk merealisasikan hal tersebut Indonesia masih belum mampu karena melihat dari kondisi yang adabahwa masih minimnya akan sumber daya manusia (SDM) untuk mengelola dari Potensi Alamyang dimiliki Indonesia. selain itu juga perdagangan bebas dimaknai oleh Indonesia sebagai hal yang belum seperti sebesar dari negara Tiongkok.

Pembangunan dari Citra Indonesia didalam ACFTA ditujukan kepada bagaimana untuk menjawab dari berbagai permasalahan serta tantangan dengan tujuan akhir adalah meningkatkan dari kesejahteraan masyarakat. Pembangunan

¹² Abdurofiq, A. (2014). Menakar Pengaruh Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 terhadap Pembangunan Manusia. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, 1 (2).

Ekonomi memerlukan suatu daya dukung yang merupakan salah satu sumber utama dari pertumbuhan ekonomi. Kegiatan dari penanaman modal untuk implementasi menghasilkan investasi yang akan terus menambah pada stok modal yang gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Keuntungan dalam Citra Indonesia dalam Pelaksanaan ACFTA

1. Terbuka akses pasar Internasional seluas – luasnya
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
3. Penciptaan Perdagangan yang beralih dari nilai konsumsi *high cost* ke *low cost*
4. *Comparative Advantage*
5. Meningkatnya lapangan pekerjaan
6. Perbaikan ekosistem Investasi
7. Mencegah terjadinya monopoli perdagangan

Para pelaku usaha di Indonesia banyak yang tidak setuju atas minimnya informasi dari kesepakatan ACFTA, baik sesudah perjanjian dilaksanakan maupun sebelum dalam pengaruhnya.

Masyarakat Indonesiapun tidak banyak yang mengetahui dalam pemaknaan implementasi dari kegiatan ACFTA. Menurut Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan hanya sekitar 26,7% saja yang pernah mendengar atau mengetahui mengenai dari kesepakatan perjanjian ACFTA sisanya sebanyak 69,4% tidak mengetahui. Kurangnya informasi ini disebabkan pada pemerintah Indonesia yang kurang proaktif dalam memberikan suatu informasi kepada masyarakat luas lebih tepatnya adalah untuk para pelaku usaha sebagai individu yang terkena dampak langsung dari perjanjian tersebut.

Pemerintah dalam hal ini memandang bahwa perjanjian ACFTA telah memberikan suatu peluang untuk dapat meningkatkan ekspor Indonesia terutama ke negara Tiongkok, serta adanya kesempatan untuk meningkatkan

nilai Investasi di Indonesia. untuk itu pemerintah Indonesia menganggap bahwa wacana dari kesepakatan ulang untuk ACFTA tidak perlu dilakukan karena apabila hal itu terjadi memerlukan biaya yang tinggi dan proses birokrasi yang sangat lama hingga dapat menurunkan Citra Indonesia dalam lingkungan dari negara – negara ASEAN dan Tiongkok hingga ke skala pergaulan Internasional.

Wacana Renegoisasi dalam perjanjian ACFTA mendapatkan pro dan kontra yang berimplikasi terhadap perbedaan argumen dari masing – masing pihak yang dikelompokkan pada sub bidang yang membahas Ekonomi, Politik serta Sosial.¹³ Menurut pada bidang Ekonomi yang meliputi suatu isu – isu perekonomian didalam ACFTA yang diantaranya Daya Saing Industri, Perumbuhan Ekonomi hingga Investasi Infrastruktur. Pada bidang ekonomi ini aspek yang memicu timbulnya perdebatan adalah, Daya Saing, ACFTA merupakan suatu aspek yang cukup signifikan didalam perekonomian baik negara – negara ASEAN serta Indonesia. daya saing industri ini menjadi perdebatan apabila untuk menjamin apakah negara tersebut mampu bertahan pada perdagangan bebas di era globalisasi yang ditambah adanya momentum kesepakatan yang sudah disepakati yang membuat suatu persaingan yang sangat ketat bagi masyarakatnya karena skalanya sudah global.¹⁴ Aspek Infrastruktur yang membuat melemahnya bidang ini di Indonesiamemberikan suatu indikasi yang kuat bahwa pemerintah tidak dapat mempersiapkan perekonomian dalam rencana kedepannya dengan matang untuk meraih hal positif dari kegiatan ACFTA ini. Infrastruktur yang kian bertambah namun diiringi juga bunga kredit yang tinggi, kompleksitas birokrasi yang tinggi dan masih adanya pungutan liar serta peraturan yang tidak pro rakyat yang

¹³ Kartikasari, E. (2014)/. Respon Indonesia terhadap ACFTA: Pro-Kontra Wacana Renegoisasi. Cakrawala: Jurnal Penelitian Sosial, 3 (1).

¹⁴ Ke, J. (2015). The ASEAN – China Free Trade Area: Neighbors, Relatives or Foes? China and WTO Review, 1 (2), 191 – 222.

mengindikasikan bahwa pemerintah tidak dapat mampu melahirkan iklim ekonomi untuk mendorong peningkatan sektor ekonomi.

Pada aspek Politik yang menyebabkan pada perdebatan ACFTA adalah Posisi Strategis negara Indonesia, desakan untuk negosiasi ulang terhadap kebijakan penandatanganan ACFTA akan mempersulit posisi Indonesia didalam forum Internasional. Karena dalam Perspektif sudut pandang hubungan Internasional kedekatan antara Indonesia dengan Tiongkok akan berdampak positif karena Tiongkok merupakan salah satu *Emerging Power* yang cukup stabil dan kuat. Aspek lainnya adalah negara – negara ASEAN merasa bahwa Keterwakilan Pembuat Kebijakan ini tidak banyak dilakukan dengan melibatkan para pelaku – pelaku bisnis. Dalam hal ini dirasa bahwa ACFTA merupakan kebijakan monopoli perekonomian nasional Indonesia maupun negara – negara di ASEAN. Serta Aspek Legalitas karena sesuai Pasal 16 ayat 3 Nomor 24 Tahun 2000 perspektif hukum Internasional dalam ranah konstitusi Republik Indonesia tentang Perjanjian Internasional.

Aspek Sosial yang memicu pada Citra Indonesia dalam implementasi ACFTA adalah Sosialisasi Informasi hal ini dipicu pada adanya kegagalan dari miskonsepsi yang merugikan dari Industri kecil dan menengah karena kurangnya sosialisasi dapat berimplikasi pada kurang adanyapersiapan yang baik sehingga tidak sanggup dalam persaingan skala internasional atau global. Ketenagakerjaanpun merupakan aspek yang penting karena Pelaksanaan dari Perjanjian ACFTA ini dapat menimbulkan ancaman PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) secara sepihak terhadap pekerja dari industri yang tidak siap dalam persaingan keberlangsungan Perdagangan Bebas yang merupakan karakteristik dari perjanjian ACFTA ini. Aspek Perlindungan Konsumenpun menjadi faktor penting karena membuka peluang atas akses pasar ekspor anggota Asia Tenggara dan Tiongkok, namun secara implementasi hal ini menjadi suatu ancaman dalam meningkatkan daya saing produk dan

memberikan suatu perlindungan hak konsumen.

Citra Indonesia dimata Internasional dalam Perjanjian ACFTA kian terhimpit karena Tiongkok merupakan sebuah ancaman bagi negara – negara ASEAN lainnya yaitu menyangkut dari isu kontemporer Laut China Selatan. Implikasi tersebut bahwa klaim – klaim sepihak oleh negara Tiongkok saat ini dilakukan seperti kepulauan Spratly milik Brunei Darussalam secara sepihak diklaim oleh Tiongkok serta Teritorial Laut Vietnam pun menjadi isu terhangat dalam perdebatan antara kedua negara tersebut. Perjanjian ACFTA yang terjadi tidak diiringi pada aspek Politik Keamanan Iternasional, berangkat dari hal tersebut negara – negara di Asia Tenggara menyadari bahwa permasalahan melawan Tiongkok terkait pada klaim atas Laut China Selatan tidak bisa diselesaikan secara personal. Maka ASEAN melahirkan sebuah kerjasama dalam merumuskan deklarasi yaitu *Declaration on the South China Sea* yang merupakan implikasi atas manuver negara Tiongkok yang menimbulkan kekhawatiran negara – negara di Asia Tenggara.

Dengan melihat adanya pasang surut dari hubungan ASEAN dengan Tiongkok pada aspek ketidaksiapan industri didalam pihak ASEAN dikhawatirkan untuk mempengaruhi hubungan kedua regional tersebut, karena ASEAN menaruh curiga bahwa Tiongkok merupakan sebuah ancaman karena kebangkitan dari negara Tiongkok sebagai sesuatu kekuatan ekonomi global yang baru seiring dengan adanya kekuatan militer Tiongkok hal ini menjadikan politik dan militer Tiongkok yang sulit dibendung. Jika Indonesia secara mendadak untuk melakukan protes pada perjanjian ACFTA dengan memberlakukan Renegoisasi dikhawatirkan akan menimbulkan suatu ketegangan diantara keduanya. Karena sejak normalisasi hubungan antara negara – negara di ASEAN – Tiongkok, negara dibawah bendera ASEAN menyatakan tidak akan berkonfrontasi dengan negara Tiongkok.

Namun menurut beberapa pihak renegoisasi dianggap sangat krusial,

karena aspek daya saing negara Indonesia yang kian tertinggal oleh industri Tiongkok. Hal ini berimplikasi terhadap ekonomi yang kian menurun dan harga barang dalam negeri yang tidak kompetitif di Pasar, Pertimbangan yang dapat membuat produk industri nasional kalah saing dengan Produk Tiongkok sebagai implementasi dari perjanjian ACFTA, adalah;

- a. Struktur perdagangan yang kian naik pada ekspor industri Tiongkok naik hingga hampir menyentuh angka 62%;
- b. Pemerintah Tiongkok memiliki sebuah *master plan* dan *action plan* yang tersusun secara sistematis yang membuat Tiongkok telah menyiapkan dana yang besar untuk membantu Industrinya pada pelebaran Perdagangan Internasional;
- c. BUMN hanya menguasai hulu saja. Hal ini berimplikasi pada efisiensi yang dirasa kurang karena industri nasional menetapkan harga jual yang tinggi dibandingkan produk Tiongkok yang dirasa masih dibawah harga produk lokal;
- d. Jasa otoritas moneter pemerintahan negara Tiongkok mampu mendorong untuk perbankan bekerja yang efisien berimplikasi terhadap strategi untuk menyediakan kredit untuk pengusaha – pengusaha lokal.

Maka dari suatu Citra Indonesia dalam pergaulan Internasional yang berimplikasi terhadap wacana renegotiasi yang dilatarbelakangi terhadap tiga perbedaan (1) perbedaan perspektif pada peran negara terkait kebijakan ACFTA, ada dua kelompok yaitu pro renegotiasi yang menginginkan peran pemerintah tidak hanya regulator sedangkan kelompok kontra dari renegotiasi pemerintah menginginkan untuk stabilisator dalam kondisi perekonomian yang semakin tidak diuntungkan akibat kebijakan ACFTA. (2) perbedaan kepentingan ekonomi, para penolak renegotiasi berpendapat bahwa ACFTA seharusnya dipandang sebagai pendukung perluasan kesempatan kerja bukan

sebagai ancaman dari terjadinya PHK. (3) selain dua hal tersebut orientasi politik dari negara Indonesia merujuk pada ancaman hubungan dinamika dari hubungan antara Tiongkok dengan negara – negara ASEAN jika Indonesia tetap bersikeras untuk menolak kebijakan ACFTA maka dikhawatirkan untuk kemunculan Tiongkok yang menjadi ancaman keamanan kawasan dan monopoli perdagangan yang kemudian berimplikasi terhadap kondisi politik didalam negeri.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap kerjasama Indonesia Dalam mendukung Kerjasama Acfta Asean Tahun 2010, untuk alasan mengapa Indonesia ikut andil kedalam perjanjian ACFTA yaitu (1) Kepentingan Politik yaitu membahas Dengan slogan dari Thousand Friends, Zero Enemy tentunya sangat memiliki pengaruh kuat terhadap politik luar negeri yang pada akhirnya membuka peluang kerjasama dan diplomasi Indonesia didalam kancah internasional. Peningkatan hubungan Indonesia – Tiongkok juga dapat dilihat dalam momen perayaan 65 tahun hubungan Bilateral Indonesia – Tiongkok, Jokowi melakukan kunjungan kembali ke Tiongkok pada tanggal 25 – 28 Maret 2015. (2) Kepentingan Ekonomi yaitu sebab pengaruh dari Investasi terhadap suatu perekonomian negara dapat tercermin dari pendapatan nasional negara, investasi yang berkolerasi pada hal positif dengan GDP, secara genereal dapat diartikan bahwa jika investasi naik, maka GDP akan cenderung naik. (3) Kepentingan Ideologi untuk alasan Indonesia ikut ke dalam sebuah organisasi ACFTA yaitu pada dasarnya Tiongkok merupakan negara yang bersifat Hard Power yang mampu membuat negara Tiongkok bertransformasi menjadi sebuah negara dari ideologi yang tertutup menjadi negara yang terbuka yang dalam kondisi ini mampu serta siap melakukan berbagai intervensi terhadap negara – negara yang masih ingin berkembang salah satunya adalah Indonesia. (4)

Kepentingan Citra/Image pada suatu Citra Indonesia dalam pergaulan Internasional, keuntungan Citra Indonesia dalam Pelaksanaan ACFTA yaitu terbukanya akses pasar Internasional seluas-luasnya, Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan, Penciptaan perdagangan yang beralih dari nilai konsumsi high cost ke low cost, dan Mencegah terjadinya monopoli perdagangan.

Penelitian ini sangat menarik untuk dikaji, baik untuk kalangan akademisi atau lainnya. Bahwa Analisis Indonesia terkait kebijakan ACFTA Secara Teoritis penulisan ini dapat menambah dari pengetahuan serta menjadi kebermanfaatannya secara luas karena masyarakat Indonesia yang masih banyak belum tahu akan kerjasama ini, kemudian dapat menjadikan implementasi didalam khalayak umum tentang dampak perjanjian ACFTA terhadap ekonomi Indonesia dan dengan adanya kepenulisan ini diharapkan untuk mampu memberikan sumber dari Ilmu Pengetahuan agar masyarakat sadar betul bahwa Perdagangan Bebas merupakan aspek penting dalam sebuah masa depan bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurofiq, A. (2014). Menakar pengaruh masyarakat ekonomi ASEAN 2015 terhadap pembangunan Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 1(2).
- Alviyan, A. (2017). *ANALISIS PENGARUH RCA (REVEALED COMPARATIVE ADVANTAGE), PDB (PRODUK DOMESTIK BRUTO) DAN NILAI TUKAR VALAS TERHADAP EKSPOR BERSIH NON-MIGAS SAAT KERJASAMA ACFTA (ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA) DI ASEAN PERIODE 2007-2015* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA).
- Amanda, R. (2021). Hegemoni Dibalik Hubungan Bilateral Tiongkok-Indonesia. *Pamator Journal*, 14(1), 34-39.
- Anele, K. K. (2021). The Potential Impact of Piracy on the ACFTA: A

Nigerian Perspective. *J. Territorial & Mar. Stud.*, 8, 5.

Arimbhi, P., & Hutapea, Y. (2016). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ACFTA (ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA) DI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 3(1), 24-41.

Baihaqi, A. (2015). *Trade Facilitation Dan Kinerja Ekspor Tekstil Dan Produk Tekstil Negara Anggota Asean China Free Trade Area (Acfta)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

Brama Handite, M. (2021). Analisis Kerja Sama Bilateral Indonesia–Tiongkok Dalam Sektor Energi Baru Terbarukan: Studi Kasus Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Batang Toru (Doctoral dissertation, Muhammad Brama Handite).

Dies Nurhayati, M. P. (2015). STRATEGI INDONESIA DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBAL DIBIDANG EKONOMI. *JURNAL HERITAGE*, 3(1), 33-48.

Ekakusumawati, E. (2018). ANALISIS RATIFIKASI ASEAN CHINA FREE TRADE AGREEMENT OLEH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL. *PLENO JURE*, 7(2), 28-37.

Fachrudin, M., & Syah, W. H. H. (2020). Pengaruh ACFTA, PDB dan Kurs Terhadap Impor Barang Asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT). *JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI*, 4(2).

Ferrianta, Y., Hanani, N., Setiawan, B., & Muhaimin, W. (2012). Impact of Trade Liberalization Asean-China Free Trade Area (ACFTA) on the Performance of Indonesia Maize Economy. *Journal of Basic and Applied Scientific Research*, 2(7), 6801-6809.

Firdaus, R. S. (2019). KHASANAH KEDAULATAN DALAM REGIONALISME DI ERA GLOBALISASI (Studi Kasus Implementasi ACFTA Di Indonesia). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 19(2).

Habibah, S. (2021). Kerja Sama Indonesia dan China dalam Rangka ACFTA (Asean-China Free Tread Area). Skripsi Universitas Sumatera Utara Program Studi Ilmu Politik.

Hidayadi, T., & Nugrahani, H. S. D. (2020). Stereotip Warga Tionghoa Dalam Geopolitik Hubungan Indonesia dengan Tiongkok. *Muqoddima Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi*, 1(2), 133-144.

- Hidayat, M. N. (2018). Analisis Kebijakan Pemulihan Citra Indonesia pada Masa Kepemimpinan Presiden SBY. *Jurnal Administrative Reform*, 5(4), 227-242.
- Juwita, M. R., Wang, T., Sukma, Y. G., Iskandar, M., & Supriyadi, A. (2020). Potentials and Challenges of Chinese Foreign Direct Investment in Indonesia. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, 17(2), 195-217
- Kaluge, D., & Muslikhati, A. (2010). Analisis Perdagangan Indonesia Pasca Pemberlakuan ACFTA (Studi Komparatif Indonesia-China). *JEPE: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 11226.
- Kartikasari, E. (2014). RESPON INDONESIA TERHADAP ACFTA: PRO KONTRA WACANA RENEGOSIASI. *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial*, 3(1).
- Ke, J. (2015). The ASEAN-China Free Trade Area: Neighbors, Relatives or Foes?. *China and WTO Review*, 1(2), 191-222.
- Lamado, F. (2017). Pengaruh ACFTA (ASEAN China Free Trade Agreement) Terhadap Stabilitas Industri Indonesia (Doctoral Dissertation, Perpustakaan)
- Luerdi, L. (2021). Melihat Tiongkok dalam Pembentukan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA).
- Marantika, D., Erwinsyah, M. B., Hatmoko, J. U. D., & Khasani, R. R. (2017). Analisis Risiko Investasi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. *Jurnal Karya Teknik Sipil*, 6(1), 324-335.
- Qomara, G. (2015). Kebangkitan Tiongkok dan Relevansinya terhadap Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional Universitas Airlangga*, 8(2), 31-44.
- Rachmadito, R. P. (2020). *Kompetisi produk lokal Indonesia dan produk Cina Pasca ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA): Studi kasus produk aksesoris elektronik di CV. Makmur Jaya Engineering* (Doctoral dissertation, Universitas Pelita Harapan).
- Rakhmat, M. Z., Tarahita, D., Permadi, D. R., Pashya, M. H., Purnama, Y., & Juan, M. F. T. V. (2020).
Ekonomi Politik Hubungan Indonesia-Tiongkok 2020. INDEF
- Setiawan, S. (2012). ASEAN-CHINA FTA: Dampaknya Terhadap Ekspor Indonesia dan Cina. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 6(2), 129

150.

Sheng, Y., Tang, H. C., & Xu, X. (2014). The impact of the ACFTA on ASEAN–PRC trade: estimates based on an extended gravity model for component trade. *Applied Economics*, 46(19), 2251- 2263.

Sinaga, L. C. (2016). Indonesia di tengah kesepakatan ACFTA. *Jurnal Penelitian Politik*, 7(2), 13.

Sudira, I. N., Situmorang, M., Triwibowo, A., Martha, J., Syawfi, I., & Maria, F. (2019). Karakter kebijakan luar negeri Indonesia era pemerintahan Joko Widodo: perubahan atau keberlanjutan?.

Sukma, R. (2009). Indonesia-China relations: The politics of reengagement. In *Living with China* (pp. 89-106). Palgrave Macmillan, New York.

Tiara Tri Irawan, T. (2018). Motif Tiongkok Dalam Memberikan Bantuan Luar Negeri (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

Tiaranitasari, R. (2014). *DAMPAK EKONOMI POLITIK PERSAINGAN PRODUK LOKAL DAN PRODUK IMPOR DALAM KESEPAKATAN ACFTA 2011-2012 (Studi kasus: Persaingan Apel dan Jeruk Lokal dengan Apel dan Jeruk China di Batu, JawaTimur)* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).

Widodo, W. (2014). LEGAL PROTECTION OF BUSINESS IN BUSINESS FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN THE STATE ACFTA. "Legal Protection, 47.

Wirapati, B. A., & Kusumawardhani, N. A. S. (2010). Is ACFTA A Proper Strategy Of Sustainable Poverty Alleviation?: Proof From The Depletion Of Saving Rate. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 13(1), 75-102.

Yamin, M., & Windymadaksa, S. (2017). Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung sebagai mercusuar hubungan Indonesia-Tiongkok. *Jurnal Politik Profetik*, 5(2), 200-218.